

ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KEKUMUHAN KELURAHAN TANAH DATAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14/PRT/M/2018

Dewi Marni¹, Sofyan Husein Siregar², Imam Suprayogi³

¹Mahasiswa Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Riau

²Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan, Universitas Riau

³Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Riau

Email: demarni11@gmail.com

Abstract

The development of slums in urban areas is inseparable of the increases in population and population activity. In addition, undirected and unplanned development also supports the degradation of the quality of residential environment. One area that is included in the slum area is located in Tanah Datar Sub-District. The residential area of Tanah Datar Sub-District is right in the heart of Pekanbaru city. Thus, living conditions and the welfare of the people who live in these settlements greatly affect the face of a city. The characteristics and conditions of slums in each region is different. Thus, this study aims to identify the condition and level of slums of a residential area in order to determine alternatives to handling slum areas appropriately. The method used is exploratory descriptive of phenomena and facts relating to the condition of the community and the environment of slum areas based on the criteria of the Minister of PUPR Regulation Number 14/PRT/M/2018. The results showed that there were 5 RW were categorized as mild slums and 2 RW were categorized as not slums in Tanah Datar sub-district.

Keywords : Settlement, Slum Area, Slum Level

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan sebuah kawasan dengan tingkat pembangunan yang cukup tinggi dan jumlah penduduk yang cukup besar, salah satunya Kota Pekanbaru. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk semakin bertambah dan daerah ini menjadi tempat pemukiman yang ramai dan padat penduduk. Berikut data jumlah penduduk Kota Pekanbaru dari Tahun 2016-2018.

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

Tahun	Jumlah Penduduk
2016	1.064.566 jiwa
2017	1.091.088 jiwa
2018	1.117.359 jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas aktivitas penduduk yang semakin tinggi dan cepat, perlu untuk disikapi dan diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah terkait. Karena, hal ini akan berdampak terhadap peningkatan kebutuhan akan kawasan hunian atau pemukiman. Sehingga, diperlukan pengembangan kawasan pemukiman yang terencana dan terpadu untuk memenuhi tingginya kebutuhan akan tempat tinggal masyarakat yang tinggal di Kota Pekanbaru. Padatnya aktivitas pada sebuah kota memiliki dampak yang menimbulkan permasalahan di perkotaan, salah satunya yaitu timbulnya kawasan pemukiman kumuh.

Pemukiman kumuh menurut UU No. 1 Tahun 2011 adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana



yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Pekanbaru Tahun 2016, terdapat tujuh lokasi prioritas penanganan tingkat tinggi yang telah ditetapkan, salah satunya kawasan kumuh di Kelurahan Tanah Datar dengan luas sekitar 7,20 Ha.

Berdasarkan Panduan Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Volume 1 Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR 2015, menyatakan bahwa sasaran pemerintah melalui Dirjen Cipta Karya periode tahun 2015 – 2019 adalah 100% akses air minum, 0% luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi. Namun, program penanganan wilayah kawasan kumuh di Kelurahan Tanah Datar dari tahun 2016 sampai akhir tahun 2018 masih tersisa sekitar 5,18 hektar luas kawasan kumuh. Sehingga, masih ada target penyelesaian penanganan kawasan pemukiman kumuh sekitar 5,18 hektar sampai akhir tahun 2019 guna menunjang tercapainya program pemerintah 0% luas kawasan kumuh perkotaan periode 2015-2019. Berikut data luas kawasan kumuh Kelurahan Tanah Datar dari Tahun 2014-2018.

Tabel 3. Luas Kawasan Kumuh Kelurahan Tanah Datar Tahun 2014-2018

No	Sumber Data	Tahun	Luasan Kumuh
1	SKEP Walikota Pekanbaru No. 189	2014	1,00 Ha
2	RP3KP Kota Pekanbaru 2016	2016	7,20 Ha
3	Kotaku Provinsi Riau 2018	2017 akhir	6,30 Ha
4	Kotaku Provinsi Riau 2018	2018 akhir	5,18 Ha

Sumber : Kotaku 2019

Penanganan kawasan kumuh perkotaan merupakan tanggung jawab semua pihak bersama pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, kehadiran pemerintah dalam mengatasi permasalahan pemukiman kumuh menjadi faktor yang sangat penting. Selain itu, kawasan pemukiman kumuh merupakan permasalahan yang bersifat multisektoral. Oleh karena itu, penanganan kawasan kumuh harus melibatkan semua pihak terkait secara terpadu tentu akan membantu tercapainya penanganan kawasan pemukiman kumuh. Namun, hal yang paling penting dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh adalah keterbatasan penanganan terhadap indikator penyebab kekumuhan di kawasan pemukiman kumuh.

Salah satu tujuan penelitian adalah menentukan tingkat kekumuhan kawasan pemukiman kumuh berdasarkan standar Kementerian PUPR 2018. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat melihat indikator-indikator yang menjadi penyebab kekumuhan kawasan pemukiman di Kelurahan Tanah Datar. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa indikator Kementerian PUPR 2018 yang tidak digunakan seperti indikator KLB, sistem pengelolaan limbah domestik/komunal/terpusat dan sarana proteksi kebakaran dikarenakan keterbatasan kegiatan penelitian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yang dianalisis dengan deskriptif eksploratif. Penarikan sampel menggunakan rumus Slovin dengan persen ketidaktepatan 8%. Sehingga, didapatkan 141 responden sebagai objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan kriteria pembobotan berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018. Berikut daftar indikator yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.



Tabel 3. Formulasi Penilaian Tingkat Kekumuhan Lokasi Pemukiman			
Aspek		Kriteria	Parameter
Identifikasi Kondisi Kekumuhan			
Kondisi Bangunan Gedung	Bangunan	Ketidakteraturan bangunan	76% - 100%
		Tingkat kepadatan bangunan	Kumuh Tinggi
		Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis	51% - 75%
Kondisi Jalan	Jalan	Jaringan jalan yang tidak terlayani	Kumuh Sedang
		Kualitas permukaan jalan lingkungan	25% - 50%
Kondisi Penyediaan Air Minum	Penyediaan	Ketersediaan akses air minum aman	Kumuh Rendah
		Kebutuhan air minum yang terpenuhi	< 25%
Kondisi Drainase Lingkungan	Drainase	Ketersediaan drainase lingkungan,	Tidak Kumuh
		Kemampuan drainase lingkungan mengalirkan limpasan air hujan	
		Kualitas konstruksi drainase lingkungan.	
Kondisi Pengelolaan Limbah Sampah	Pengelolaan	Sarana prasarana pengelolaan air limbah yang memenuhi teknis.	Tidak Kumuh
		Sarana dan prasarana persampahan yang tidak memenuhi teknis	
Kondisi proteksi kebakaran	pengelolaan	Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Tidak Kumuh
		Sarana proteksi kebakaran.	

Sumber : Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018.

Selanjutnya, hasil pembobotan dikategorikan berdasarkan nilai rentang untuk menentukan tingkat kekumuhan menggunakan rumus berikut :

$$NR = \frac{\sum \text{Nilai Tertinggi} - \sum \text{Nilai Terendah}}{3}$$

Kategori Tidak Kumuh (K0) = < 14

Kategori Kumuh Ringan (K1) = 14-33

Kategori Kumuh Sedang (K2) = 34-52

Kategori Kumuh Berat (K3) = 53-70

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis pembobotan berdasarkan indikator tingkat kekumuhan pemukiman, didapatkan beberapa tingkat kekumuhan kategori RW tidak kumuh dan RW kumuh ringan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 4 sampai Tabel 7.

Analisis Tingkat Kekumuhan RW I

Indikator	Persentase	Kategori	Nilai
Ketidakteraturan lokasi bangunan	10%	Tidak Kumuh	0
Kepadatan bangunan	Rendah	Kumuh Ringan	1
Kondisi bangunan tidak sesuai teknis	50%	Kumuh Ringan	1
Area jalan tidak terlayani	5%	Tidak Kumuh	0
Kualitas jalan tidak baik	0%	Tidak Kumuh	0
Ketidaktersediaan akses air minum	10%	Tidak Kumuh	0
Kebutuhan air minum tidak terpenuhi	10%	Tidak Kumuh	0
Saluran drainase tidak tersedia	20%	Tidak Kumuh	0
Kualitas drainase buruk	0%	Tidak Kumuh	0
Genangan air >2x setahun	5%	Tidak Kumuh	0
Air limbah tidak terkelola	20%	Tidak Kumuh	0
Prasarana sampah tidak tersedia	40%	Kumuh Ringan	1
Sampah tidak dikelola dengan baik	100%	Kumuh Berat	5
Proteksi kebakaran tidak tersedia	95%	Kumuh Berat	5
Total Nilai		13	
Kategori		Tidak Kumuh	

Sumber : Data Primer 2019



Tabel 5. Analisis Tingkat Kekumuhan RW II

No	Indikator	Persentase	Kategori	Nilai
0	Ketidakteraturan lokasi bangunan	15%	Tidak Kumuh	0
1	Kepadatan bangunan	Ringan	Kumuh Ringan	1
2	Kondisi bangunan tidak sesuai teknis	15%	Tidak Kumuh	0
3	Area jalan tidak terlayani	10%	Tidak Kumuh	0
4	Kualitas jalan tidak baik	0%	Tidak Kumuh	0
5	Ketidaktersediaan akses air minum	0%	Tidak Kumuh	0
6	Kebutuhan air minum tidak terpenuhi	0%	Tidak Kumuh	0
7	Saluran drainase tidak tersedia	35%	Kumuh Ringan	1
8	Kualitas drainase buruk	0%	Tidak Kumuh	0
9	Genangan air >2x setahun	10%	Tidak Kumuh	0
10	Air limbah tidak terkelola	25%	Kumuh Ringan	1
11	Prasarana sampah tidak tersedia	50%	Kumuh Ringan	1
12	Sampah tidak dikelola dengan baik	100%	Kumuh Ringan	5
13	Proteksi kebakaran tidak tersedia	75%	Kumuh Sedang	3
Total Nilai		12		
Kategori		Tidak Kumuh		

Sumber : Data Primer 2019

Tabel 6. Analisis Tingkat Kekumuhan RW III

No	Indikator	Persentase	Kategori	Nilai
0	Ketidakteraturan lokasi bangunan	5%	Tidak Kumuh	0
1	Kepadatan bangunan	Ringan	Kumuh Ringan	1
2	Kondisi bangunan tidak sesuai teknis	15%	Tidak Kumuh	0
3	Area jalan tidak terlayani	5%	Tidak Kumuh	0
4	Kualitas jalan tidak baik	26,31%	Kumuh Ringan	1
5	Ketidaktersediaan akses air minum	0%	Tidak Kumuh	0
6	Kebutuhan air minum tidak terpenuhi	0%	Tidak Kumuh	0
7	Saluran drainase tidak tersedia	35%	Kumuh Ringan	1
8	Kualitas drainase buruk	0%	Tidak Kumuh	0
9	Genangan air >2x setahun	0%	Tidak Kumuh	0
10	Air limbah tidak terkelola	5%	Tidak Kumuh	0
11	Prasarana sampah tidak tersedia	40%	Kumuh Ringan	1
12	Sampah tidak dikelola dengan baik	100%	Kumuh Berat	5
13	Proteksi kebakaran tidak tersedia	100%	Kumuh Berat	5
Total Nilai		14		
Kategori		Kumuh Ringan		

Sumber : Data Primer 2019

Tabel 7. Analisis Tingkat Kekumuhan RW IV

No	Indikator	Persentase	Kategori	Nilai
0	Ketidakteraturan lokasi bangunan	45%	Kumuh Ringan	1
1	Kepadatan bangunan	Ringan	Kumuh Ringan	1
2	Kondisi bangunan tidak sesuai teknis	60%	Kumuh Sedang	3
3	Area jalan tidak terlayani	30%	Kumuh Ringan	1
4	Kualitas jalan tidak baik	14,3%	Tidak Kumuh	0
5	Ketidaktersediaan akses air minum	0%	Tidak Kumuh	0
6	Kebutuhan air minum tidak terpenuhi	0%	Tidak Kumuh	0
7	Saluran drainase tidak tersedia	10%	Tidak Kumuh	0
8	Kualitas drainase buruk	0%	Tidak Kumuh	0
9	Genangan air >2x setahun	5%	Tidak Kumuh	0
10	Air limbah tidak terkelola	5%	Tidak Kumuh	0
11	Prasarana sampah tidak tersedia	80%	Kumuh Berat	5
12	Sampah tidak dikelola dengan baik	100%	Kumuh Berat	5
13	Proteksi kebakaran tidak tersedia	95%	Kumuh Berat	5
Total Nilai		21		
Kategori		Kumuh Ringan		

Sumber : Data Primer 2019



Label 8. Analisis Tingkat Kekumuhan RW V

No	Indikator	Persentase	Kategori	Nilai
0	Ketidakteraturan lokasi bangunan	5%	Tidak Kumuh	0
1	Kepadatan bangunan	Ringan	Kumuh Ringan	1
2	Kondisi bangunan tidak sesuai teknis	65%	Kumuh Sedang	3
3	Area jalan tidak terlayani	0%	Tidak Kumuh	0
4	Kualitas jalan tidak baik	5%	Tidak Kumuh	0
5	Ketidaktersediaan akses air minum	0%	Tidak Kumuh	0
6	Kebutuhan air minum tidak terpenuhi	0%	Tidak Kumuh	0
7	Saluran drainase tidak tersedia	50%	Kumuh Ringan	1
8	Kualitas drainase buruk	20%	Tidak Kumuh	0
9	Genangan air >2x setahun	15%	Tidak Kumuh	0
10	Air limbah tidak terkelola	50%	Kumuh Ringan	1
11	Prasarana sampah tidak tersedia	65%	Kumuh Sedang	3
12	Sampah tidak dikelola dengan baik	100%	Kumuh Berat	5
13	Proteksi kebakaran tidak tersedia	100%	Kumuh Berat	5
Total Nilai			19	
Kategori			Kumuh Ringan	

Sumber : Data Primer 2019

Label 9. Analisis Tingkat Kekumuhan RW VI

No	Indikator	Persentase	Kategori	Nilai
0	Ketidakteraturan lokasi bangunan	25%	Kumuh Ringan	1
1	Kepadatan bangunan	Ringan	Kumuh Ringan	1
2	Kondisi bangunan tidak sesuai teknis	60%	Kumuh Sedang	3
3	Area jalan tidak terlayani	10%	Tidak Kumuh	0
4	Kualitas jalan tidak baik	0%	Tidak Kumuh	0
5	Ketidaktersediaan akses air minum	0%	Tidak Kumuh	0
6	Kebutuhan air minum tidak terpenuhi	0%	Tidak Kumuh	0
7	Saluran drainase tidak tersedia	10%	Tidak Kumuh	0
8	Kualitas drainase buruk	0%	Tidak Kumuh	0
9	Genangan air >2x setahun	45%	Kumuh Ringan	1
10	Air limbah tidak terkelola	45%	Kumuh Ringan	1
11	Prasarana sampah tidak tersedia	85%	Kumuh Berat	5
12	Sampah tidak dikelola dengan baik	100%	Kumuh Berat	5
13	Proteksi kebakaran tidak tersedia	90%	Kumuh Berat	5
Total Nilai			22	
Kategori			Kumuh Ringan	

Sumber : Data Primer 2019

Label 10. Analisis Tingkat Kekumuhan RW VII

No	Indikator	Persentase	Kategori	Nilai
0	Ketidakteraturan lokasi bangunan	23,8%	Tidak Kumuh	0
1	Kepadatan bangunan	Ringan	Kumuh Ringan	1
2	Kondisi bangunan tidak sesuai teknis	80,9%	Kumuh Berat	5
3	Area jalan tidak terlayani	19,04%	Tidak Kumuh	0
4	Kualitas jalan tidak baik	5,9%	Tidak Kumuh	0
5	Ketidaktersediaan akses air minum	0%	Tidak Kumuh	0
6	Kebutuhan air minum tidak terpenuhi	0%	Tidak Kumuh	0
7	Saluran drainase tidak tersedia	14,28%	Tidak Kumuh	0
8	Kualitas drainase buruk	5,6%	Tidak Kumuh	0
9	Genangan air >2x setahun	85,7%	Kumuh Berat	5
10	Air limbah tidak terkelola	14,28%	Tidak Kumuh	0
11	Prasarana sampah tidak tersedia	66,66%	Kumuh Sedang	3
12	Sampah tidak dikelola dengan baik	95,23%	Kumuh Berat	5
13	Proteksi kebakaran tidak tersedia	100%	Kumuh Berat	5
Total Nilai			24	
Kategori			Kumuh Ringan	

Sumber : Data Primer 2019



KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
Tingkat kekumuhan kawasan pemukiman di Kelurahan Tanah Datar dikategorikan sebagai berikut : a) RW I dikategorikan tidak kumuh, b) RW II dikategorikan tidak kumuh, c) RW III dikategorikan kumuh ringan, d) RW IV dikategorikan kumuh ringan, e) RW V dikategorikan kumuh ringan, f) RW VI dikategorikan kumuh ringan, g) RW VII dikategorikan kumuh ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2019. Kota Pekanbaru dalam Angka. BPS Kota Pekanbaru
- Djappeda. Kota Pekanbaru. 2016. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Pekanbaru.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2015. Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Volume 1/2015. Direktorat Jendral Cipta Karya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta
2018. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta
2019. Profil Kelurahan Tanah Datar Kota Pekanbaru. Kota Tanpa Kumuh. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta
- Presiden RI. 2011. Undang - Undang No. 1 Tahun 2011. tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sekretariat Negara, Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.

